

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

MUH. RIADHI HAMDA



**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUH. RIADHI HAMDA
A21116016**



kepada

**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Di susun dan di ajukan oleh

MUH. RIADHI HAMDA
A21116016

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 1 Oktober 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi, SE., M. Si
NIP. 19691113 199303 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M. Si
NIP. 19720921 200604 2 001

Ketua Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Prof. Dra. Hj. Dian A.S Parawansa, M. Si., Ph.D
NIP. 19620405 198702 2 001

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

disusun dan diajukan oleh

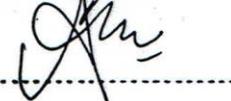
MUH. RIADHI HAMDA

A21116016

telah di pertahankan dalam sidang ujian skripsi pada
4 November 2020 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.Cepi Pahlevi,SE.,M.Si	Ketua	1..... 
2	Dr.Hj.Andi Ratna Sari Dewi,SE.,M.Si	Sekretaris	2..... 
3	Dr.Julius Jilbert,SE.,MIT	Anggota	3..... 
4	Andi Aswan,SE.,MBA.,M.Phill.,DBA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin




Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si.,Ph.D

NIP. 19620405 198702 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Riadhi Hamda
NIM : A21116016
Jurusan/Program Studi : Manajemen/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



Muh. Riadhi Hamda

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan, kerja sama, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, adik, Tante dan keluarga besar yang senantiasa menyayangi, mendidik, memberikan doa, dan dukungan yang penuh kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Abdullah Sanusi, SE., MBA., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini memberikan arahan dan masukan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H.Cepi Pahlevi, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si selaku Pembimbing II , penulis sangat berterimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini untuk membimbing, memberikan masukan, arahan,

nasehat, dan motivasi serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis selama proses hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr.Julius Jilbert, SE., MIT dan Bapak Andi Aswan, SE., MBA., M.Phill., DBA selaku dosen penguji, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bantuan yang tidak dapat terhitung kepada Penulis selama berada di dalam maupun diluar bangku perkuliahan.
8. Pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menempuh studi. Khususnya Pak Asmari, Pak Tamsir, Pak Safar, Ibu Susi dan Pak Bur yang telah memberikan kemudahan berupa informasi dan pengurusan segala berkas selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi saat ini.
9. Keluarga Besar HIPERMAWA Komisariat Majauleng yang telah memberikan pengalaman, kerja sama, tanggung jawab, suka dan duka yang pernah dirasakan selama selama penulis menempuh studi
10. Keluarga Besar KOPMA Unhas yang telah memberikan pengalaman, kerja sama, tanggung jawab, suka dan duka yang pernah dirasakan selama selama penulis menempuh studi
11. Teman – Teman Alumni SMA Negeri 2 Wajo Angkatan 2016 yang telah menemani, memberi dukungan dan kisah-kisah hebat bersama sejak SMA hingga saat ini.
12. Teman-teman angkatan seperjuangan (Fastco 2016) yang senantiasa menjadi teman kuliah yang berkesan bagi penulis dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman KKN TEMATIK Pulau Sebatik Unhas Gel. 102 Kab. Nunukan,Khususnya Posko Desa Lapri, Kec Sebatik Utara atas pengalaman dan suka duka yang dirasakan selama mengabdikan di masyarakat.

14. Dan untuk semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, demi kelanjutan dan hasil yang lebih maksimal dari pembuatan skripsi/penelitian ini.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki dalam penelitian ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberi sumbangsih sekecil apapun untuk diterapkan pada penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 Oktober 2020

Penulis

Muh. Riadhi Hamda

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah

Muh. Riadhi Hamda
Cepi Pahlevi
Andi Ratna Sari Dewi

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kinerja keuangan dan perbedaan tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di ambil dari laporan keuangan tahunan masing – masing Bank yang di peroleh dari website masing – masing Bank. Adapun Jumlah sampel yakni 3 Bank Syariah yang merupakan anak perusahaan Bank BUMN. Data di analisis menggunakan uji normalitas data (*Kolmogorov - Smirnov*) dan uji beda (*Uji Independent Sample T - Test* Dan *Mann Whitney U Test*). Hasil penelitian Tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah untuk masing masing rasio keuangan selama tahun 2008 – 2019 Berfluktuatif. Hasil penelitian menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov* menunjukkan FDR, CAR, dan BOPO Bank Syariah Mandiri berdistribusi normal namun CAR Bank Syariah Mandiri berdistribusi tidak normal. FDR dan CAR BRI Syariah berdistribusi normal namun ROA dan BOPO BRI Syariah berdistribusi tidak normal. FDR dan CAR BNI Syariah berdistribusi normal namun ROA dan BOPO BNI Syariah berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menggunakan *Uji Independent Sample T - Test* dan *Mann Whitney U Test*. FDR BRI Syariah lebih baik di bandingkan dengan Rasio FDR Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. FDR BRI Syariah di bandingkan dengan rasio FDR Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. CAR BNI Syariah lebih baik di bandingkan dengan Rasio CAR Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. CAR BNI Syariah dengan CAR Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan yang signifikan. CAR BNI Syariah dengan CAR BRI Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. ROA BNI Syariah lebih baik di bandingkan dengan rasio ROA Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. ROA BNI Syariah dengan ROA Bank Syariah Mandiri tidak terdapat perbedaan yang signifikan. BOPO Bank Syariah Mandiri lebih baik di bandingkan dengan rasio BOPO BRI Syariah dan BNI Syariah. BOPO Bank Syariah Mandiri di bandingkan dengan BOPO BRI Syariah dan BNI Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Bank Syariah, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan

ABSTRACT

Comparative Analysis of Financial Performance Islamic Bank

Muh. Riadhi Hamda
Cepi Pahlevi
Andi Ratna Sari Dewi

This study aims to determine the level of financial performance and differences in the level of financial performance of Bank Sharia Mandiri, BRI Sharia and BNI Sharia. The data used in this research is secondary data taken from the annual financial reports of each bank which are obtained from the websites of each bank. The number of samples is 3 Islamic banks which are subsidiaries of state-owned banks. The data were analyzed using the data normality test (Kolmogorov - Smirnov) and difference test (Independent Sample T - Test and Mann Whitney U Test). Research results Fluctuating financial performance levels of Bank Sharia Mandiri, BRI Sharia and BNI Sharia for their respective financial ratios during 2008 - 2019. The results of the study using the Kolmogorov - Smirnov test showed that FDR, CAR, and BOPO for Bank Sharia Mandiri were normally distributed but CAR for Bank Sharia Mandiri was not normally distributed. BRI Sharia FDR and CAR are normally distributed but ROA and BRI Sharia BOPO are not normally distributed. FDR and CAR of BNI Sharia are normally distributed but ROA and BOPO of BNI Sharia are not normally distributed. The results of the study used the Independent Sample T - Test and the Mann Whitney U Test. BRI Sharia FDR is better than the FDR Ratio of Bank Sharia Mandiri and BNI Sharia. There is no significant difference between FDR BRI Sharia and Bank Sharia Mandiri and BNI Sharia FDR ratios. BNI Sharia CAR is better than the CAR Ratio of Bank Sharia Mandiri and BRI Sharia. CAR of BNI Sharia and CAR of Bank Sharia Mandiri has a significant difference. CAR BNI Sharia and CAR BRI Sharia have no significant differences. The ROA of BNI Sharia is better than the ROA ratio of Bank Sharia Mandiri and BRI Sharia. There is no significant difference between ROA BNI Sharia and ROA of Bank Sharia Mandiri. BOPO Bank Sharia Mandiri is better than the ratio of BOPO BRI Sharia and BNI Sharia. There is no significant difference between BOPO for Bank Sharia Mandiri and BOPO for BRI Sharia and BNI Sharia.

Keywords: Financial Performance, Islamic Bank, Financial Statements, Financial Ratios

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	10
2.1.1 Bank.....	10
2.1.1.1 Pengertian Bank.....	10
2.1.1.2 Jenis – Jenis Bank	10
2.1.2 Bank Syariah.....	11
2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	11
2.1.2.2 Sejarah Perbankan Syariah.....	12
2.1.2.3 Prinsip Bank Syariah	14
2.1.2.4 Fungsi Utama Bank Syariah.....	17
2.1.2.5 Jenis – Jenis Bank Syariah.....	19
2.1.3 Laporan Keuangan.....	23
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	23
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan	23
2.1.3.3 Pihak –Pihak Pemakai Laporan Keuangan.....	24
2.1.3.4 Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan	27
2.1.3.5 Jenis – Jenis Laporan Keuangan	29
2.1.3.6 Komponen Neraca dan Laba Rugi.....	30
2.1.4 Kinerja Keuangan.....	32
2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan.....	32
2.1.4.2 Metode Mengukur Kinerja Keuangan	33
2.1.4.3 Manfaat Penilaian Kinerja.....	34
2.1.5 Rasio Keuangan.....	35
2.1.5.1 Pengertian Rasio.....	35
2.1.5.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan	35
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pemikiran	40
2.4 Hipotesis	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	42
3.3 Populasi Dan Sampel.....	42
3.4 Jenis Dan Sumber Data	43
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	48
4.1.1 Bank Syariah Mandiri	48
4.1.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	48
4.1.1.2 Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri	49
4.1.1.3 Budaya Bank Syariah Mandiri	49
4.1.1.4 Produk Dan Jasa Bank Syariah Mandiri	50
4.1.2 BRI Syariah.....	51
4.1.2.1 Sejarah Singkat BRI Syariah	51
4.1.2.2 Visi Dan Misi BRI Syariah.....	53
4.1.2.3 Budaya BRI Syariah	53
4.1.2.4 Produk Dan Layanan BRI Syariah	55
4.1.3 BNI Syariah.....	55
4.1.3.1 Sejarah Singkat BNI Syariah	55
4.1.3.2 Visi Dan Misi BNI Syariah.....	57
4.1.3.3 Budaya BNI Syariah	57
4.1.3.4 Produk Dan Jasa BNI Syariah	58
4.2 Analisis Tingkat Kinerja Keuangan Bank Syariah	60
4.2.1 Analisis Rasio keuangan Bank Syariah Mandiri.....	60
4.2.1.1 Analisis Rasio Likuiditas Bank Syariah Mandiri.....	60
4.2.1.2 Analisis Rasio Solvabilitas Bank Syariah Mandiri	61
4.2.1.3 Analisis Rasio Profitabilitas Bank Syariah Mandiri	62
4.2.2 Analisis Rasio Keuangan BRI Syariah.....	64
4.2.2.1 Analisis Rasio Likuiditas BRI Syariah	64
4.2.2.2 Analisis Rasio Solvabilitas BRI Syariah	65
4.2.2.3 Analisis Rasio Profitabilitas BRI Syariah.....	67
4.2.3 Analisis Rasio Keuangan BNI Syariah.....	69
4.2.3.1 Analisis Rasio Likuiditas BNI Syariah	69
4.2.3.2 Analisis Rasio solvabilitas BNI Syariah.....	70
4.2.3.3 Analisis Rasio Profitabilitas BNI Syariah.....	71
4.3.1 Uji Normalitas Data Bank Syariah Mandiri	73
4.3.2 Uji Normalitas Data BRI Syariah.....	74
4.3.3 Uji Normalitas Data BNI Syariah.....	74
4.4 Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	75
4.4.1 Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah	75
4.4.2 Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BNI Syariah	79
4.4.3 Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BRI Syariah Dengan BNI Syariah.....	82
4.5 Pembahasan.....	87

BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data BUS Dan UUS Di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Tabel Jaringan Kantor Individual Bank Umum Syariah Di Indonesia	4
Tabel 1.3 Aset Bank Umum Syariah (Dalam Juta Rupiah)	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	44
Tabel 4.1 FDR Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 – 2019	60
Tabel 4.2 CAR Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 – 2019	61
Tabel 4.3 ROA Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 – 2019.....	62
Tabel 4.4 BOPO Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 – 2019.....	63
Tabel 4.5 FDR BRI Syariah Tahun 2008 – 2019	64
Tabel 4.6 CAR BRI Syariah Tahun 2008 – 2019.....	66
Tabel 4.7 ROA BRI Syariah Tahun 2008 – 2019.....	67
Tabel 4.8 BOPO BRI Syariah Tahun 2008 – 2019	68
Tabel 4.9 FDR BNI Syariah Tahun 2008 – 2019	69
Tabel 4.10 CAR BNI Syariah Tahun 2008 – 2019.....	70
Tabel 4.11 Tabel ROA BNI Syariah Tahun 2008 - 2019.....	71
Tabel 4.12 Tabel BOPO BNI Syariah Tahun 2008 - 2019.....	72
Tabel 4.13 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	73
Tabel 4.14 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	74
Tabel 4.15 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	74
Tabel 4.16 Statistik Deskriptif <i>Statistic Independent Sample T – Test</i> Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah .	75
Tabel 4.17 Hasil Rank Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah	76
Tabel 4.18 Hasil Uji <i>Statistic Independent Sample T - Test</i> Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah .	77
Tabel 4.19 Hasi Uji Statistic Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah	78

Tabel 4.20	Statistik Deskriptif <i>Statistic Independent Sample T – Test</i> Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BNI Syariah	79
Tabel 4.21	Hasil Rank Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> Bank Syariah Mandiri Dengan BNI Syariah	80
Tabel 4.22	Hasil Uji <i>Statistic Independent Sample T - Test</i> Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan BNI Syariah .	81
Tabel 4.23	Hasil Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> Bank Syariah Mandiri Dengan BNI Syariah.....	81
Tabel 4.24	Statistik Deskriptif <i>Statistic Independent Sample T – Test</i> Kinerja Keuangan BRI Syariah Dengan BNI Syariah.....	83
Tabel 4.25	Hasil Rank Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> BRI Syariah Dengan BNI Syariah.....	84
Tabel 4.26	Hasil Uji <i>Statistic Independent Sample T - Test</i> Perbandingan Kinerja Keuangan BRI Syariah Dengan BNI Syariah.....	85
Tabel 4.26	Hasil Uji Statistic <i>Mann Whitney U test</i> Bank Syariah Mandiri Dengan BRI Syariah.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Rasio Bank Syariah.....	101
Lampiran 2 Penetapan Peringkat Rasio Keuangan.....	102
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Data Bank Syariah	103
Lampiran 4 Hasil uji Statistic Independent Sample T – Test	104
Lampiran 5 Hasil Uji Mann Whitney U Test.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting perkembangan perekonomian negara.

Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan. Perbankan merupakan salah satu dari system keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro.

Salah satu sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter adalah lembaga keuangan bank atau perbankan. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia agar tujuan antara atau *intermediate target* berupa penentuan indikator ekonomi dapat tercapai sehingga dengan itu tujuan akhir pembangunan dapat diwujudkan. Dengan lembaga perbankan yang baik sehingga tujuan antara yang ditetapkan dapat dicapai, maka bank dalam sistem keuangan nasional merupakan bagian yang sangat penting.

Pada tahun 2018 penduduk Indonesia berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 265,015 juta jiwa dan 207 juta jiwa atau 87,2% memeluk agama islam. Hal ini menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Berdasarkan sistem ajaran islam bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran di mulai dari persoalan hak atau hukum sampai kepada lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan di adakan untuk mewedahi aktivitas komsumsi, simpanan dan investasi.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman bunga bank merupakan riba. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 menetapkan bahwa praktek pembungaan hukumnya adalah haram baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pegadaian, Pasar Modal, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun di lakukan individu. selain itu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada.

Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat di rujuk, kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19–22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belumsanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibentuk. Dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sistem perbankan syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan, di mana UU tersebut menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah.

Tabel 1.1 Data BUS Dan UUS Di Indonesia

Tahun	BUS	UUS
2008	5	25
2009	6	25
2010	11	23
2011	11	24
2012	11	24
2013	11	22
2014	12	22
2015	12	22
2016	13	21
2017	13	21
2018	14	19
2019	14	19

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK

Pada tabel diatas menunjukkan perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan terkhusus bank umum syariah. Pada tahun 2010,2014,2016 dan 2018 jumlah bank umum syariah mengalami peningkatan untuk menjalankan kegiatan operasi bisnisnya di Indonesia. Faktor kepercayaan para nasabah akan sangat berdampak pada kemajuan perkembangan perusahaan perbankan khususnya perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.2 Tabel Jaringan Kantor Individual Bank Umum Syariah Di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT.Bank Aceh Syariah	26	89	27
2	PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	25	4
3	PT.Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
5	PT.Bank BRI Syariah	51	210	12
6	PT.Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT.BNI Syariah	68	207	14
8	PT.Bank Syariah Mandiri	129	426	55
9	PT.Bank Mega Syariah	27	35	5
10	PT.Bank Panin Syariah Dubai Syariah	13	4	-
11	PT.Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12	PT.BCA Syariah	14	12	18
13	PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-
14	PT.Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
	Total	478	1.229	198

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK

Berdasarkan tabel 1.2 dapat di lihat bahwa jaringan individual kantor Bank Umum Syariah. Pada tahun 2019 dari 14 Bank Umum Syariah telah di buka 478 Kantor Cabang ,1.229 Kantor Cabang Pembantu,dan 198 Kantor Kas. Diantara 14 bank Umum Syariah terdapat 3 Bank yang merupakan Anak Perusahaan Bank BUMN,seperti Bank Syariah Mandiri, BRI syariah, BNI Syariah.

Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi sejak senin 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank Mandiri Syariah hadir,tampil dan tumbuh memadukan idealism usaha dengan rohani, yang melandasi kegiatan

operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai – nilai rohani yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiorahnya di perbankan Indonesia. Pada tahun 2019 Bank Syariah Mandiri memiliki 129 Kantor Cabang, 426 Kantor Cabang Pembantu, 55 Kantor Kas.

BRI syariah tidak lepas dari akuisisi yang lakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Artha pada 19 desember 2007. BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam. BRI Syariah melihat potensi besar segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menemtramkan, BRI Syariah terus tumbuh positif. Pada tahun 2019 BRI Syariah memiliki 51 Kantor Cabang, 210 Kantor Cabang Pembantu dan 12 Kantor Kas.

BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pada tanggal 19 Juni 2010. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada tahun 2019 BNI Syariah memiliki 68 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu, dan 14 Kantor Kas.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor oleh bank untuk bisa terus bertahan. kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang di capai bank dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran, teknologi, maupun sumber manusia. Apabila dilihat dari total asset setiap Bank Umum Syariah memiliki assets yang cukup besar seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Aset Bank Umum Syariah (Dalam Juta Rupiah)

Nama Bank	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Syariah Mandiri	66.955.671	70.399.709	78.831.722	87.915.020	98.341.116
BRI Syariah	20.341.033	24.230.247	27.687.188	31.543.384	37.915.084
BNI Syariah	19.492.112	23.017.667	28.314.175	34.822.442	41.048.545

Sumber: sumber di olah

Berdasarkan data di atas maka terlihat selama kurun waktu 2014-2018 di antara 3 Bank yang merupakan anak perusahaan Bank BUMN, Bank Syariah Mandiri memiliki asset paling besar di bandingkan BRI Syariah dan BNI Syariah. Selain itu selama tahun 2014-2015 BRI Syariah memiliki asset yang lebih besar di bandingkan BNI Syariah, Namun selama tahun 2016-2018 BNI syariah memiliki asset yang lebih besar di bandingkan BRI Syariah. Apabila hanya merujuk pada jumlah asset yang di peroleh Bank maka sangat tidak relevan bila mengatakan bahwa Bank yang di maksud sudah berkinerja baik. Total asset hanya bisa di jadikan acuan untuk menentukan seberapa besar perusahaan tersebut. Banyak instrumen yang dapat di jadikan untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan yang salah satunya adalah menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan di gunakan alat untuk menilai kinerja keuangan, rasio keuangan di hitung dari laporan keuangan Bank yang secara berkala menunjukkan kualitas Bank. Laporan keuangan Bank menunjukkan kinerja keuangan yang telah di capai pada waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat di ketahui dengan menghitung rasio keuangan dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas/profitabilitas. Analisis rasio secara teknis untuk mengetahui hubungan antara pos pos tertentu dalam neraca dan laba rugi secara bersama – sama. Selain itu analisis rasio juga membantu manajemen dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi pada perbankan berdasarkan suatu informasi laporan keuangan yang baik dengan

membandingkan rasio – rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang pada internal perbankan maupun perbandingan rasio dengan perbankan lainnya atau dengan rata – rata industri pada saat titik yang sama atau perbandingan eksternal.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengkaji perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah Dengan mengangkat judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah untuk masing masing rasio keuangan ?
- 2) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI syariah dan BNI syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah untuk masing masing rasio keuangan.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan tingkat kinerja keuangan keuangan Bank Syariah Mandiri ,BRI Syariah dan BNI Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan. Disamping itu penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru tentang perbankan syariah.

2) Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut. serta sebagai bahan informasi tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah.

3) Bagi Bank Syariah

Sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan usahanya .

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas kedalam lima bab yang dapat di rincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teori, kerangka pikir, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, tempat & waktu penelitian, populasi & sampel, jenis & sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian & definisi operasional, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran umum objek penelitian ,hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup

Penutup terdiri kesimpulan hasil penelitian dan saran penelitian kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian yang di laksanakan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2006 : 11) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Undang – Undang nomor 20 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Munawir (2008 : 330) bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan(*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*) serta sebagai yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Bank

Praktek perbankan di Indonesia saat ini di atur dalam Undang - Undang perbankan memiliki beberapa jenis bank.

- 1) Berdasarkan Undang – Undang perbankan no 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
 - a. Bank umum
 - b. Bank pembangunan
 - c. Bank tabungan
 - d. Bank pasar
 - e. Bank desa
 - f. Lumbung desa
 - g. Bank pegawai
 - h. Dan Bank jenis lainnya

2) Berdasarkan Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dua jenis bank yaitu :

a. Bank Umum

Bank umum sesuai dengan Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat(BPR) menurut Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Jeni Susyanti (2016 : 45) bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, dan universal serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,yang mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Ascarya & Diana Yumanita (2015 : 4) bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-

hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Menurut Ismail (2011 : 33) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

2.1.2.2 Sejarah Perbankan Syariah

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya sebuah *local saving* atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar (Ahmad An-Naggar, 1985). Setelah beroperasi beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karenamasalah manajemen. Bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian (pada tahun 1977), lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia.

Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19 –22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibentuk.

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah yang kemudian diikuti oleh beroperasinya lembaga reksa dana syariah oleh PT Danareksa. Pada tahun yang sama pula, sebuah lembaga berbagai pembiayaan (*multifinance*) syariah berdiri, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali adanya UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundangundangan lainnya yang mendukung sistem operasional perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produkproduknya dengan hukum positif yang berlaku (yang tidak lain berbasis bunga—sistem perbankan konvensional) di Indonesia. Akibatnya, ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sistem perbankan syariah secara tegas

ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaandalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan, di mana UU tersebut menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah.

2.1.2.3 Prinsip Bank Syariah

1) Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal

dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

2) Prinsip Syarikah (*Musyarakah*)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

3) Prinsip Jual Beli (*Al-murabahah*)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. *Murabahah* dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun

demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

4) Prinsip Titipan (*Al Wadiah*)

Al Wadiah dapat di artikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Pada prinsip *Wadiah Yad Al- Amanah* penerima harta atau titipan tidak lagi meng-*idle*-kan asset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Dengan kata lain tidak boleh di manfaatkan oleh penerima titipan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis *Wadiah Yad Al Amanah* adalah jasa penitip atau *Save Deposit Box* (penitipan barang berharga)

5) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Sewa (*financial dan operational lease*) atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.

2.1.2.4 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yang terdiri dari:

1) Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *Al-Mudharabah*. Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya, atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang titipkan atau di investasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya di investasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan *return* atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing – masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang di peroleh bank syariah.

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang di salurkan. *Return* atau pendapatan yang di peroleh tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang di peroleh bank atas penyaluran atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan.

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. pendapatan yang di peroleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad akad kerja sama adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan berupa margin keuntungan dan bagi hasil, juga memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)*. Bank telah membayar sejumlah dana yang telah di himpunya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah di himpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah harus segera di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.

3) Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini di berikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat di berikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*) pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring. *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang di harapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank syariah berlomba lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya.

2.1.2.5 Jenis – Jenis Bank Syariah

1) Berdasarkan tinjauan fungsinya Bank Syariah terdiri dari :

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah adalah bank yang aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah di sebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi dengan bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri. Sehingga laporan yang di terbitkan oleh bank syariah akan terpisah induknya. Dengan demikian dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain, seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, di lakukan secara terpisah.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang di bentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan dalam prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang di lakukan oleh bank umum syariah yaitu aktivitas menawarkan produk penghimpunan dana ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari

dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat karena merupakan bagian tertentu dalam organisasi bank konvensional. Namun demikian unit usaha syariah tetap di pisahkan dengan transaksi yang terjadi bank konvensional.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS Tidak dapat melaksanakan lalu lintas pembayaran atau transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hany penghimpunan dana dan penyaluran dana.

2) Berdasarkan tinjauan statusnya Bank Syariah terdiri dari :

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap di banding produk yang di tawarkan oleh bank non devisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang – kurangnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin dalam melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri. Bank non devisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa yaitu telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut turut.

3) Berdasarkan tinjauan segi levelnya Bank Syariah terdiri dari:

a. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah Negara maupun kantor cabang yang ada di Negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di Negara bank syariah di dirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis dan melakukan pengawasan terhadap operasional di kantor cabang bank syariah.

Kantor pusat bank tidak melakukan kegiatan melayani produk dan jasa perbankan kepada masyarakat umum. Akan tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antar kantor seperti transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang, transaksi antar cabang, dan transaksi lainnya yang tidak dapat dilakukan kantor cabang.

b. Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah di dasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target

pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi kordinator dari cabang dalam mencapai target pengumpulan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.

c. Kantor Cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang di beri kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan transaksi perbankan. Semua transaksi perbankan dapat di lakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk baik produk pengumpulan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam kegiatan operasionalnya.

d. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu hanya melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas pengumpulan dana pihak ketiga. Dalam hal pembiayaan, kantor cabang pembantu hanya di beri kewenangan untuk mencari calon nasabah.

e. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitasnya yang dapat di lakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran maupun penarikan tunai. Transaksi lain seperti pembukaan giro *wadiah*, Deposito *Mudharabah*, pelayanan transfer di tangani oleh kantor cabang penuh.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan ,baik bank maupun non bank pada waktu tertentu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap tersebut(Kasmir,2006:239)

Menurut Sofyan Syafri Harahap (Dalam Garin Shasy Novista,2016:22) laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Menurut Harmono (Dalam Khusnul Dian Choiriyah,2017:19) laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dan peristiwa lain yang di klasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang langsung berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva,kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja laba rugi adalah penghasilan dan beban.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bersifat historis ,menyeluruh dan merupakan hasil kombinasi fakta yang tercatat, prinsip dan anggapan serta konvensi atau kebiasaan dalam akuntansi dan pendapat pribadi. Menurut kasmir dan Jakfar (2017 :113) secara umum laporan keuangan memiliki tujuan laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Memberi informasi keuangan tentang jumlah aktiva,jenis jenis aktiva
- 2) Jumlah kewajiban,jenis jenis kewajiban,dan jumlah modal

- 3) Memberi informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang di peroleh ,sumber sumber pendapatan.
- 4) Jumlah biaya yang di keluarkan berikut yang dapat di keluarkan pada periode tertentu
- 5) Memberi informasi tentang perubahan perubahan yang terjadi dalam aktiva,kewajiban,dan modal dalam suatu perusahaan
- 6) Memberi informasi tentang kinerja manajemen dalam periode dari hasil laporan keuangan yang di sajikan.

2.1.3.3 Pihak –Pihak Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan atau pihak – pihak pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Munawir (2008 : 7) pihak pemakai laporan keuangan terdiri dari:

1) Manajemen

Manajemen membutuhkan informasi akuntansi keuangan selain sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan keuangan,investasi juga di perlukan untuk penentuan insentif atau bonus. Informasi keuangan sebagai variabel dalam berbagai keputusan keuangannya, antara lain untuk menentukan *debt to equity ratio* atau *interest coverage ratio* yang merupakan faktor penting yang sangat penting dalam keputusan perlu tidaknya menambah jumlah utang.

2) Investor, kreditor dan pemegang saham

Pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan informasi tersebut pemegang saham memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual bahkan menambahnya. Pemegang saham perlu memonitor kepemimpinan atau perilaku manajemen dalam menggunakan dan melepas sumber daya.

Jika perusahaan akan meminjam uang baik kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, maka calon pemberi pinjaman pada umumnya menginginkan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat dan mampu memperoleh keuntungan yang memadai sehingga pinjaman tersebut termasuk bunganya terjamin, dan akan dapat di bayar kembali. Secara khusus keputusan tersebut akan mengarah kepada *investment focus* atau *stewardship* dalam beberapa kasus hal tersebut terjadi secara bersamaan.

Dalam *investment focus decisions* penekanannya adalah portofolio sekuritas yang konsistendengan pilihan investor antara lain tentang resiko, kembalian (*return*), penghasilan dividen. informasi yang di perlukan masing masing berbeda secara signifikan misalnya pendekatan *mispriced securities* dengan *fundamental analysis approach* berbeda dengan *technical analysis approach*.

3) Suplier Dan Lender

Pemasok atau pemberi pinjaman dalam pengambilan keputusan memberi kredit atau tidak, mereka akan mempertimbangkan likuiditas, profitabilitas, leverage, jumlah utang di banding dengan modal atau *debt to equity ratio*, mereka tidak hanya membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui informasi tersebut tetapi juga berkeinginan untuk memonitor metode yang di gunakan. Jika telah di buat keputusan memberikan pinjman maka laporan keuangan merupakan variabel penting dalam menentukan sifat hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

4) Pemerintah

Pemerintah memerlukan informasi keuangan dalam rangka untuk :

- a. Peningkatan pendapatan, misalnya penerimaan dari pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak kekayaan.
- b. Untuk memonitor pelaksanaan kontrak pemerintah ,misalnya penentuan jumlah penggantian dalam kontrak *cost plus basis*, atau memonitor keuntungan pelaksanaan tekhnis pelaksanaan bisnis pemerintah (BUMN).

- c. Penentuan tarif, misalnya tarif listrik, dan tarif telpon
- d. Menentukan kepatuhan organisasi atau perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

5) Karyawan

Ketertarikan atas informasi keuangan oleh karyawan dapat timbul dari berbagai motivasi. Karyawan yang berkepentingan tentang kelangsungan usahadan profitabilitas (laporan keuangan merupakan sumber informasi penting tentang potensi, profitabilitas dan solvabilitas) masa depan. Memonitor kelangsungan program pensiun, laporan keuangan sebagai dasar kontrak antara karyawan dengan perusahaan dalam penentuan bonus atau pembagian keuntungan.

6) Pelanggan atau Konsumen

Keterhubungan antara perusahaan dengan konsumennya dapat berlangsung dalam beberapa tahun. Dalam banyak hal, hubungan tersebut dapat berbentuk kewajiban legal yang berkaitan dengan jaminan dan manfaat yang di tangguhkan, kelangsungan perhatian perusahaan terhadap pelayanan kepada pelanggan. Konsumen atau pelanggan mempunyai kepentingan untuk memonitor kelangsungan operasi perusahaan karena mempunyai hubungan jangka panjang dan laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pelanggan atau konsumen untuk menyimpulkan kelangsungan perusahaan.

7) Pihak- Pihak Lain

Pihak Pihak lain adalah badan atau pihak –pihak yang peduli lingkungan, akademisi, masyarakat umum, dan kelompok khusus yang mencoba mempengaruhi perusahaan yang berkaitan dengan keuangan atau urusan lain. Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan untuk merespon beberapa tuntutan dari pihak pihak – pihak tertentu

2.1.3.4 Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan

Bentuk laporan keuangan di buat sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan,tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Berikut ini bentuk laporan keuangan yang umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1) Laporan Keuangan Neraca

a. Bentuk skontro atau horizontal (*account form*)

Neraca ini berbentuk T di mana sisi aktiva sebelah kiri dan passive (kewajiban dan ekuitas) sebelah kanan.

PT Bank XXX Tbk
Neraca
Per 31 Desember 2018

Aktiva		Passiva	
- Aktiva lancar	XX	- Hutang jangka pendek	XX
- Penyertaan	XX	- Hutang Jangka panjang	XX
- Aktiva tetap	XX		
- Aktiva lainnya	XX	- Ekuitas	
- Jumlah aktiva	XX	Jumlah passiva	XX

b. Bentuk Laporan atau Vertikal

Neraca dalam bentuk ini tersusun rapi berurutan mulai aktiva di ikuti dengan kewajiban dan terakhir ekuitas. Bentuk laporan keuangan vertical sebagai berikut :

PT Bank XXX Tbk
Neraca
Per 31 Desember 2018

Aktiva	
- Aktiva lancar	XX
- Penyertaan	XX
- Aktiva tetap	XX
- Aktiva lainnya	XX
Jumlah Aktiva	XX
Passiva	
- Hutang jangka panjang	XX
- Hutang jangka panjang	XX
- Ekuitas	XX
Jumlah Passiva	XX

c. Bentuk lainnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan posisi keuangan perusahaan

2) Bentuk Laporan Laba Rugi

Khusus untuk laporan laba rugi hanya memiliki 2 macam yaitu :

a. Bentuk tunggal (*Single step system*)

Dalam bentuk laporan rugi laba tidak terinci dan tidak di tentukan berdasarkan total pendapatan di kurangi total biaya. Dalam bentuk laporan ini laporan laba rugi di susun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan di luar usaha. Contoh laporan laba *rugi single step system* seperti berikut ini :

PT Bank XXX Tbk Perhitungan laba rugi Per 31 Desember 2018		
Pendapatan		
- Pendapatan usaha	XX	
- Pendapatan di luar usaha	XX	
Jumlah pendapatan		<u>XXX</u>
Biaya – biaya		
- Biaya bunga	XX	
- Biaya penjualan	XX	
- Biaya umum dan administrasi	XX	
- Biaya di luar usaha	XX	
Jumlah Biaya		<u>XXX</u>
Laba bersih sebelum pajak		XXX

b. Bentuk majemuk (*multiple step system*)

Bentuk majemuk merupakan bentuk yang di hitung secara rinci dan bertahap yaitu dengan membedakan antara pendapatan maupun biaya dari usaha dengan luar usaha. Bentuk laporan sebagai berikut :

PT Bank XXX Tbk
Perhitungan laba rugi
Per 31 Desember 2018

Pendapatan		
- Pendapatan usaha	XX	
- Biaya – biaya bersih	XX	
Jumlah Pendapatan		XX
Laba bersih usaha		
- Pendapatan di luar usaha	XX	
- Biaya di luar usaha	XX	
Laba bersih		XXX
Laba sebelum pajak		XXX

2.1.3.5 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus di sajikan sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan. Dalam praktiknya jenis laporan keuangan sebagai berikut :

1) Neraca

Neraca ,merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan bank yang di maksud adalah posisi aktiva (harta), Passiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca di dasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

2) Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat di batalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus di laksanakan apabila persyaratan yang di sepakati bersama di penuhi. Sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

3) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam periode tertentu. Dalam laporan ini

tergambar jumlah pendapatan dan sumber –sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis jenis biaya yang di keluarkan

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan bank yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus di susun berdasarkan konsep kas selama periode tertentu.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

6) Laporan Keuangan Dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari cabang – cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.1.3.6 Komponen Neraca dan Laba Rugi

Secara garis besar neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal di posisi passive.komponen harta yang tergambar di posisi aktiva sebagai berikut :

1) Aktiva lancar terdiri dari :

- a. Kas
- b. Rekening pada bank (giro dan tabungan)
- c. Deposito berjangka
- d. Surat surat berharga
- e. Piutang

- f. Persediaan
 - g. Biaya yang di bayar di muka
 - h. Pendapatan yang masih harus di terima
 - i. Aktiva lancar lainnya
- 2) Penyertaan
- 3) Aktiva tetap terdiri :
- a. Aktiva tetap berwujud yaitu
 - i. Tanah
 - ii. Mesin
 - iii. Bangunan
 - iv. Peralatan
 - v. Akumulasi penyusutan
 - vi. Aktiva tetap lainnya
 - b. Aktiva tetap tidak berwujud
 - i. *Good will*
 - ii. Hak cipta
 - iii. Lisensi
 - iv. Merek dagang
- 4) Aktiva lainnya terdiri antara lain
- a. Gedung dalam proses
 - b. Tanah dalam penyelesaian
 - c. Piutang jangka panjang
 - d. Uang jaminan
 - e. Uang muka investasi

Kemudian komponen utang (kewajiban) serta modal (ekuitas) tergambar dalam posisi passiva sebagai berikut :

- 1) Utang lancar (kewajiban jangka pendek)
 - a. Utang dagang
 - b. Utang wesel
 - c. Utang bank
 - d. Utang pajak
 - e. Biaya yang harus di bayar
 - f. Utang sewa guna usaha
 - g. Utang dividen
 - h. Utang lancar
- 2) Utang jangka panjang terdiri :
 - a. Utang hipotek
 - b. Utang obligasi
 - c. Utang bank jangka panjang
 - d. Utang jangka panjang lainnya
- 3) Ekuitas terdiri dari :
 - a. Modal saham
 - b. Agio saham
 - c. Laba di tahan
 - d. Modal sumbangan

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (Dalam Balgis Thayib, Sri Murni dan Joubert B Maramis, 2017: 1760) Kinerja keuangan adalah analisis yang di lakukan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan peraturan – peraturan dalam pelaksanaan keuangan secara baik dan benar

Menurut jumingan (Dalam Balgis Thayib, Sri Murni dan Joubert B Maramis,2017:1760) kinerja secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi

yang telah di capai dalam melaksanakan kegiatan operasional baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, teknologi dan sumber daya manusia.

Menurut Burhanuddin Widodo (2014 :13) kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas tertentu melalui aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat di ukur perkembangannya dengan mengadakan analisis data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

2.1.4.2 Metode Mengukur Kinerja Keuangan

Ada 4 metode yang di gunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan atau perbankan selama ini menurut Dian Astri Fitriyah dan Afiati Kuriniasih (2016 :256 -257) yakni :

1) Metode rasio keuangan

Dalam metode ini pengukuran kinerja keuangan lebih menekankan pada operasi keuangan :

- a. Liquidity ratio
- b. Leverage ratio
- c. Probabilitas ratio
- d. Activity ratio

2) Metode *Economic Value Added* (EVA)

Metode ini memfokuskan pada penerapan nilai proses kinerja dalam 1 tahun. Dengan kata lain EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa (*residual income*) yang mengurangi biaya modal terhadap laba operasi.

3) Metode *Balance Score Card* (BSC)

Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode ini di lakukan dengan cara menyeimbangkan faktor – faktor keuangan dan nonkeuangan dari suatu perusahaan dengan mempertimbangkan 4 aspek yakni :

- a. Prospektif keuangan
- b. Pelanggan
- c. Proses bisnis internal
- d. Proses belajar dan berkembang

4) Metode radar

Metode yang di gunakan untuk melihat kinerja perusahaan yang menjadi penyempurna dari metode metode sebelumnya. Rasio radar mengelompokkan

5 rasionya yaitu :

- a. Rasio profitabilitas
- b. Rasio produktivitas
- c. Utilitas aktiva
- d. Stabilitas
- e. Rasio pertumbuhan

2.1.4.3 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja keuangan (Dian Asri Fitriah dan Afiati Kurniasih, 2016 : 258) adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur prestasi yang di capai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan.
- 2) Pengukuran kinerja dapat di gunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan
- 3) Dapat di gunakan sebagai dasar strategi perusahaan di masa yang akan datang
- 4) Sebagai bahan pertimbangan keputusan oleh pemegang kepentingan pada sebuah perusahaan
- 5) Sebagai dasar penarikan minat para investor dalam penanaman modal di pasar modal agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.5 Rasio Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Rasio

Menurut kasmir dan Jakfar (2017 :123) rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan perusahaan.

Jumingan (Dalam Duwi Hardianti dan Muhammad Saifi 2011:243) mengungkapkan bahwa rasio dalam analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antar unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Setiap rasio keuangan yang di bentuk memiliki tujuan yang ingin di capai,sehingga tidak di jumpai batasan yang jelas dan tegas beberapa rasio pada setiap aspek yang di analisis.

2.1.5.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Laporan keuangan dapat di baca sehingga menjadi berarti, maka perlu di lakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang di gunakan adalah rasio keuangan sesuai standar yang berlaku. Adapun rasio keuangan terdiri dari :

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam di tagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat di tagih serta dapat mecukupi permintaan kredit yang telah di ajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid kasmir (2006 : 268).

Rasio yang di gunakan dalam penelitian ini yakni *Finance To Deposit Ratio* (FDR). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013,*Loan deposit Ratio* (LDR) atau dalam syariah di kenal dengan *Finance to Deposit Ratio*

(FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang di berikan di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang di gunakan. Standar FDR menurut ketentuan Bank Indonesia 78%- 92%.

Adapun rumus dari FDR yaitu :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan kepada pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak ketiga (DPK)}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Semakin tinggi FDR maka resiko likuiditas bank yang di hadapi semakin besar, namun jika terlalu rendah kemungkinan perolehan pendapatan juga rendah, karena pendapatan bank salah satunya dari penyaluran dana.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. bisa juga di katakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan efisiensi bagi pihak manajemen bank. Rasio yang di gunakan dalam penelitian yakni *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal tagih. adapun rumus dari CAR yaitu :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan ketetntuan Bank Indonesia (BI), standar CAR minimal 8%. semakin besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kerugian

3) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas juga di sebut rasio profitabilitas. Rasio ini di gunakan untuk mengukur efisiensi usaha dan profitabilitas yang di capai bank

bersangkutan. Rasio yang di gunakan dalam penelitian ini yakni ROA dan BOPO.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ROA suatu Bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang di peroleh bank dan semakin baik bank tersebut menggunakan assetnya. Standar ROA menurut ketentuan Bank Indonesia di atas 1,5% Adapun rumus ROA yakni :

$$\mathbf{ROA} = \frac{\mathbf{Laba\ Sebelum\ Pajak}}{\mathbf{Rata\ Rata\ Total\ Asset}} \times \mathbf{100\%} \dots\dots\dots(3)$$

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang di keluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Standar BOPO menurut Ketentuan Bank Indonesia di bawah 92%. Rasio ini di rumuskan

$$\mathbf{BOPO} = \frac{\mathbf{Total\ Beban\ Operasional}}{\mathbf{Total\ Pendapatan\ Operasional}} \times \mathbf{100\%} \dots\dots\dots(4)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

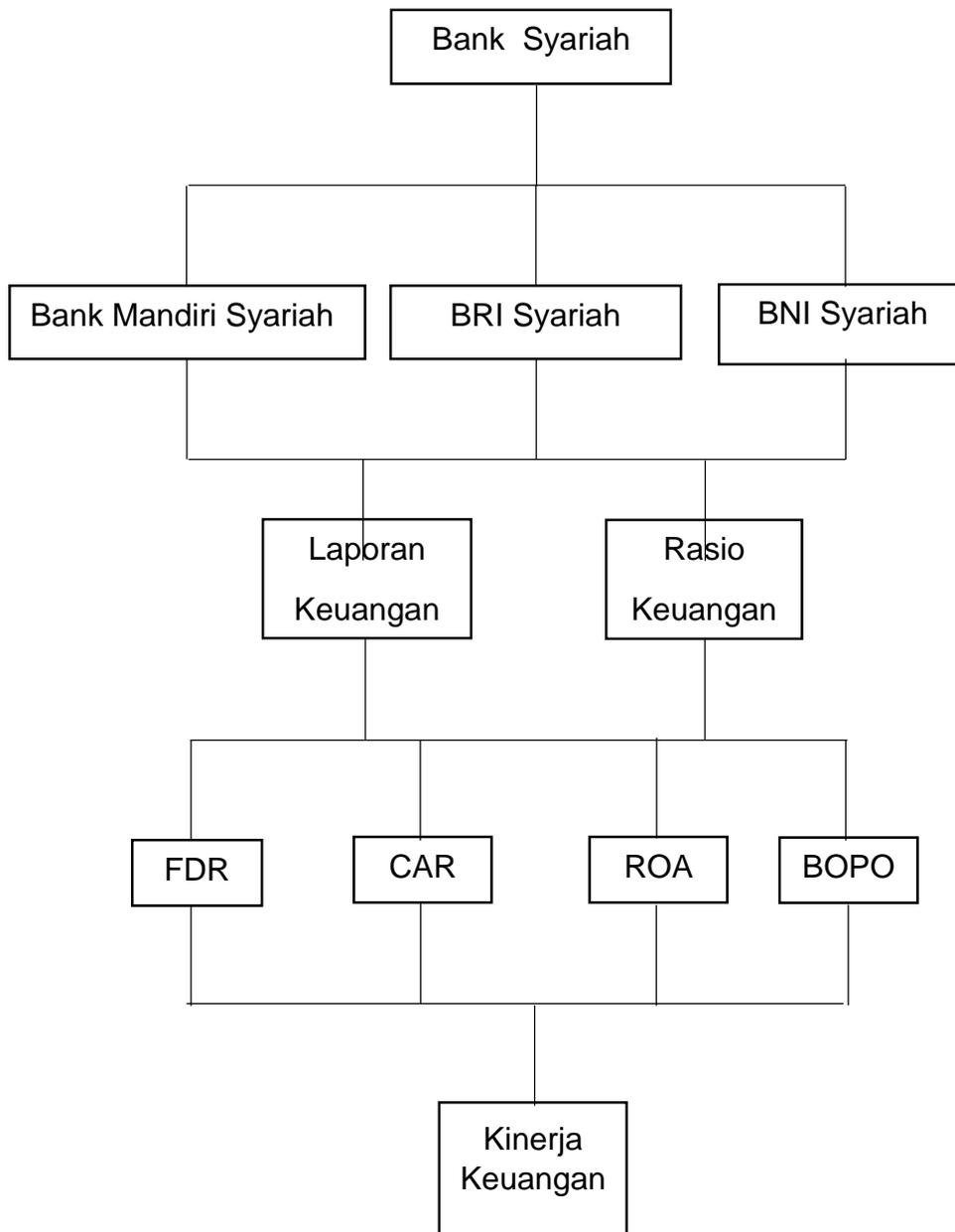
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Duwi Hardianti & Muhammad Saifi	2018	Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank umum konvensional dan Bank umum syariah berdasarkan rasio keuangan (Studi pada Bank umum konvensional dan Bank umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013 – 2016)	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil rata – rata (mean) dari masing – masing rasio menunjukkan Bank umum konvensional memiliki kinerja keuangan yang lebih baik di bandingkan Bank umum syariah sedangkan bank umum syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik di bandingkan Bank umum konvensional berdasarkan rasio CAR. Berdasarkan hasil uji independent t-test menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank umum konvensional dan Bank umum syariah terdapat perbedaan yang signifikan
2	Dian Choiriyah	2017	Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank syariah devisa dan Bank Syariah non devisa (studi kasus Bank syariah mandiri dan Bank syariah bukopin periode 2011- 2015)	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan rasio FDR kinerja keuangan Bank mandiri syariah dan Bank Syariah Bukopin tidak terdapat perbedaan yang signifikan Berdasarkan rasio ROA maka kinerja keuangan Bank mandiri syariah dan Bank Syariah Bukopin terdapat perbedaan yang signifikan Berdasarkan rasio BOPO maka kinerja keuangan Bank mandiri syariah dan Bank Syariah Bukopin terdapat perbedaan yang signifikan Berdasarkan rasio CAR maka kinerja keuangan Bank mandiri syariah dan Bank Syariah Bukopin terdapat perbedaan yang tidak signifikan
3	Ihda Karina Hasan	2017	Study atas kinerja keuangan pada Bank syariah pemerintah dan Bank syariah swasta	Hasil penelitian menunjukkan Pada aspek permodalan, rasio CAR Bank syariah swasta lebih baik di bandingkan Bank syariah pemerintah tetapi tingkat modal keduanya secara signifikan lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku Pada aspek kualitas asset rasio NPF, kinerja keuangan Bank

				<p>syariah pemerintah lebih baik di bandingkan Bank syariah swasta dalam menjaga kualitas asset terhadap resiko pembiayaan bermasalah</p> <p>Pada aspek likuiditas dengan rasio FDR, Bank syariah pemerintah lebih baik di bandingkan Bank syariah swasta</p> <p>Pada aspek rentabilitas dengan rasio ROA Bank syariah pemerintah lebih baik di bandingkan Bank syariah swasta</p> <p>Pada aspek penerapan bagi hasil dengan rasio FSR kinerja Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad bagi hasil lebih baik di bandingkan Bank syariah pemerintah</p> <p>Pada aspek pembayaran zakat dengan rasio ZPR ukuran rasio keuangan Bank syariah pemerintah tergolong lebih baik karena jumlah zakat yang di bayarkan lebih banyak di bandingkan Bank syariah swasta</p> <p>Pada aspek penerimaan pendapatan dari sumber halal rasio <i>Islamic Income vs non Islamic income</i> dalam porsi pendapatan halal Bank syariah pemerintah lebih banyak sebesar 0,01 di bandingkan Bank syariah swasta</p>
4	Dian Astri Fitriah dan Afiati Kurniasih	2016	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah (studi: BNI syariah dan BRI syariah)	<p>Hasil penelitian menunjukkan kinerja BNI syariah dan BRI syariah pada tahun 2011-2015 memiliki perbedaan jumlah rasio CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR, kinerja keuangan BNI syariah lebih baik di bandingkan BRI syariah pada tahun 2011- 2015</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan ROA pada sebuah Bank di pengaruhi oleh CAR, NPF, BOPO, FDR, NIM</p>

Sumber : Di Olah Sendiri

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Perbandingan kinerja keuangan pada perbankan Syariah dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari : Rasio Likuiditas (*Finance to Deposit Ratio*), Rasio Solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), dan Rasio Profitabilitas (*Return On Assets* dan *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI syariah untuk masing masing rasio keuangan berfluktuasi Selama tahun 2008 - 2019
2. Terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, BRI syariah dan BNI syariah.